



**INSPEKTORAT
KOTA BALIKPAPAN**

KALTIM BANGKIT
MEMBANGUN KALTIM UNTUK
BALIKPAPAN BERIMAN
LELENDUNG LELUSIA KUBILA

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH LKjIP
INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat Nya dengan berkahimya pelaksanaan Tahun Anggaran 2018, yang merupakan tahun pertama dari lima tahun Rencana Strategik Inspektorat Kota Balikpapan dan Rencana Strategik Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2016 – 2021. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Inspektorat Kota Balikpapan memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada.

Selama tahun anggaran 2018, Inspektorat Kota Balikpapan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, analisis kebijakan serta kegiatan pelaksanaan reviu laporan keuangan daerah dan evaluasi kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada Sekretariat Inspektorat yakni Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan serta Kelompok Jabatan Fungsional.



Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Balikpapan, Februari 2019

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN



Hi. DAHNIAR, S.E., M.AP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	9
B. REALISASI ANGGARAN	24
BAB IV PENUTUP	30

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA UTAMA
2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
4. SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan visi mewujudkan Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang didukung oleh penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju (madinatul Iman) untuk periode 2016-2021

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan disampaikan bahwa ruang lingkup objek tugas dan fungsi Inspektorat adalah pengawasan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta berperan penting dalam mendukung percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai visi “Mewujudkan Kota Balikpapan nyaman dihuni menuju Madinatul Iman”, sedangkan misinya adalah “Meningkatkan ketertiban umum, penegakan hukum, pemberantasan KKN dan penanganan masalah sosial” serta “Melaksanakan reformasi birokrasi”.

Dalam pencapaian misi memerlukan kajian perencanaan yang komperhensif dengan memperhitungkan secara kualitatif dan kuantitatif dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kota Balikpapan serta faktor pendanaan kegiatan, sarana/prasarana kantor yang memadai dan sumber daya non APIP yang bertugas di bidang kesekretariatan.

Sasaran Inspektorat Kota Balikpapan yang akan dicapai pada tahun 2017-2021 adalah: 1) Meningkatnya peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance); 2) Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan; 3) Meningkatnya efektivitas



implementasi pelaksanaan SPIP; 4) Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi; 5) Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut Inspektorat Kota Balikpapan menetapkan 5 Indikator Kinerja Utama :

- 1) Tingkat kapabilitas APIP;
- 2) Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
- 3) jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang;
- 4) jumlah penetapan perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM;
- 5) Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal baik.

Jika dilihat dari penggunaan anggaran, pada tahun 2018 realisasi keuangan mencapai Rp.2.906.833.970,00 yaitu sebesar 87,46% dari total anggaran yang diperoleh. Secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan telah terlaksana 97,76%.

Keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan secara umum didukung oleh sumberdaya yang ada terutama sumberdaya manusia. Beberapa hal yang tidak dapat dicapai dipengaruhi oleh beberapa kendala diantaranya keterlambatan pelaksanaan kegiatan terkait dengan birokrasi dan koordinasi dengan OPD lain ataupun dengan daerah lain, permasalahan lainnya adalah kurang tersedianya sumber daya manusia (SDM).

Pada LAKIP Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 dapat berhasil dengan baik. Untuk pencapaian sasaran Tahun 2018 dari 5 sasaran yang telah ditetapkan, semuanya telah dapat tercapai dengan baik.

Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan motivasi yang tinggi dan kerja keras dari seluruh aparat Inspektorat Kota Balikpapan untuk



dapat meningkatkan capaian kinerjanya di masa mendatang. Selain itu dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan serta instansi terkait juga sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Balikpapan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Inspektorat Kota Balikpapan untuk mendukung terciptanya "Good Governance" atau Kepemerintahan yang Baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi serta program Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2018

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan *good Governance*, transparansi dan akuntabel sekaligus sebagai alat kendali pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan.

Inspektorat Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsi berpedoman pada beberapa peraturan antara lain berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 tanggal 27 Oktober tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dimana Inspektorat Kota Balikpapan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya



berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 39 Tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan.

Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, yaitu :

A. Kegiatan Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan persediaan;
 - b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.



3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
 4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. kepatuhan entitas terhadap hasil revidi dokumen perencanaan dan penganggaran.
- B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:
1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 2. Penyalahgunaan wewenang;
 3. Hambatan dalam pelayanan publik;
 4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.



C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
7. Penanganan Whistle Blowing System.

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:



1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
 3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - b. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - c. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
- F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (joint audit) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:
1. Pengawasan Bidang Kesehatan;
 2. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan;
 3. Pengawasan Bidang Perizinan
- G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;
 2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
 3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
 4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
 5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (Probitity Audit)..



4. Mengingat Inspektorat Kota Balikpapan sebagai institusi pengawasan internal pemerintah, maka pemberdayaan peran APIP agar dapat dimaksimalkan, sehingga mampu mendeteksi secara dini apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dan APIP mampu mengawal jalannya roda pemerintahan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Inspektorat Kota Balikpapan sebagai pendorong terlaksananya Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan melalui pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;
6. Selain itu Inspektorat Kota Balikpapan juga mendukung penilaian panji-panji keberhasilan pembangunan, khususnya dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan setiap tahun.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2018 berpedoman pada Permenpan No. 53 Tahun 2014. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah ini ;

Tabel : 2.1
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/pengawasan	82%
3	Meningkatnya efektifitas implementasi pelaksanaan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang	2
4	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Penetapan Perangkat Daerah yang berpredikat WBK/WBBM	3
5	Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik"	8



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Berikut ini disajikan sasaran, program dan kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2018:

Tabel : 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3
Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/ pengawasan	82%	91.65%
Meningkatnya efektifitas implementasi pelaksanaan SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang	2	10
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Penetapan Perangkat Daerah yang berpredikat WBK/WBBM	3	3
Meningkatnya Penilaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik"	8	24



Pada awal tahun 2018, Inspektorat Kota Balikpapan menetapkan 5 indikator kinerja dan 5 sasaran strategis. Kemudian disajikan pula pada indikator kinerja utama maupun penetapan/perjanjian kinerja antar Inspektur dengan Walikota Balikpapan. Atas 5 Indikator tersebut, realisasi pada akhir periode menggambarkan bahwa seluruh target dari Indikator Kinerja tersebut telah tercapai realisasinya, yaitu target tingkat kapabilitas APIP, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/pengawasan, Jumlah Penetapan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang, Jumlah penetapan Perangkat Daerah yang berpredikat WBK, Jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik".

1. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya (2017, 2016)

Dalam realisasi kinerja tahun 2018 terdapat perubahan sasaran dan indikator kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya terdapat 3 sasaran strategis dan 7 Indikator Kinerja sedangkan di Tahun 2018 terdapat 5 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel : 3.2

Realisasi Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018	
		Realisasi	Capaian
Meningkatnya peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)	Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	100%
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	91,65%	111,77%

10



Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang	10	500%
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah penetapan perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	3	100%
Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik"	24	300%

Tabel : 3.3

Perbandingan capaian dan realisasi Kinerja tahun sebelumnya dan Tahun 2018

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2016		2017		2018	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	capaian
Meningkatnya kapabilitas APIP yang profesional dan kompeten	Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional	-	-	-	-		
	Level Kapabilitas APIP	Level 2	100%	-	-		
Meningkatnya peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)	Level Kapabilitas APIP	-	-	Level 2	100%	Level 3	100%
Penurunan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	84%	105%	-	-		
	Cakupan pengawasan yang akan dicapai	182	130%	-	-		
	Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	100%	105,26%	-	-		



Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	-	-	86,04 %	107,5 5%	91.65%	111,77 %
Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang	-	-	8	400%	10	500%
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah penetapan perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	-	-	4	200%	3	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi (kecuali Setdakot, DKK, Disdik)	-	-	-	-		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai Baik/Cukup	19 SKPD	126,67%	-	-		
Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik"	-	-	22	367%	24	300%

Keterangan :

- a. Sasaran 1 pada tahun 2016 terdapat 1 indikator kinerja yang berorientasi outcome, sehingga capaian kinerja 100%. Di Tahun 2017 berubah menjadi 1 indikator kinerja yaitu tingkat kapabilitas APiP.
- b. Tahun 2016 Pada sasaran Penurunan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terdapat 3 indikator kinerja berorientasi outcome, ketiga indikator kinerja dengan realisasi melampaui target maka capaian kerjanya melebihi 100%. Di tahun 2017 sasaran strategis tersebut



- c. Pada Tahun 2016 sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdapat 2 indikator, dan realisasinya melampaui target maka capaian kinerjanya melebihi 100%. Di tahun 2017 sasaran strategis tersebut berubah dan menjadi 1 indikator kinerja yaitu Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal “Baik”
- d. Pada tahun 2017 terdapat penambahan sasaran strategis yaitu meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan SPIP dan meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi serta penambahan indikator kinerja yaitu Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang dan jumlah penetapan perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra

Dalam realisasi kinerja tahun 2018 terdapat perubahan sasaran dan indikator kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya terdapat 3 sasaran strategis dan 7 Indikator Kinerja sedangkan di Tahun 2018 terdapat 5 sasaran strategis dan 5 Indikator kinerja. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra 2016 s/d 2021 Inspektorat Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:



Tabel : 3.4

Realisasi Kinerja dan target jangka menengah Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018	
		Realisasi Kinerja	Target jangka menengah renstra 2016 - 2021
Meningkatnya peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)	Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Level 3
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	91.65%	82%
Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan SPIP	jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan level berkembang	10	2
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah penetapan perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	3	3
Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik"	24	8

Jika dibandingkan dengan target dalam renstra Inspektorat Kota Balikpapan 2016 – 2021, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan. Terdapat juga Indikator kinerja yang melampaui target yang ditetapkan dalam renstra 2016 – 2021 yaitu: Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan, jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan level berkembang, Jumlah penetapan perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM, Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik"



Tabel : 3.5

3. Perbandingan dengan Standar Nasional

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar
Meningkatnya Peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Data BPKP menunjukkan dari 508 APIP seluruh Indonesia - Level 1 : 171 - Level 2 : 310 - Level 3 : 27
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/ pengawasan	91.65%	Balikpapan adalah yang tertinggi dari 10 kabupaten/ kota se-provinsi Kalimantan Timur untuk Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP Level berkembang	10	Surat Keputusan Inspektur
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah penetapan perangkat daerah yg berpredikat WBK/WBBM	3	Surat Wali Kota Balikpapan No.700/737/Evaslap/Itkot perihal usulan penetapan OPD berpredikat WBK/WBBM dan Peraturan Pemenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP " Baik"	24	Hasil Penilaian SAKIP Inspektorat Kota Balikpapan Berdasarkan Permenpan Nomor 12 tahun 2015



4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. **Sasaran Meningkatnya Peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)**

Indikator Kinerja utama	2018		Capain
	Target	Realisasi	%
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100

Hasil capaian kinerja dari Sasaran **Meningkatnya Peran APIP Sebagai Konseling dan Penjamin Mutu (Quality Assurance)** dengan Indikator Kinerja Tingkat **Kapabilitas APIP**, realisasi target menunjukkan level 3. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2018 adalah tercapainya level 3 yaitu penilaian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Kapabilitas APIP terkait enam proses yang selanjutnya disebut elemen yaitu:

- peran layanan APIP berupa Audit Ketaatan,
- Pengelolaan SDM berupa Pengembangan profesi individu serta identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten,
- praktek profesional berupa perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan serta kerangka kerja praktek professional dan prosesnya.
- Akuntabilitas dan manajemen kinerja berupa anggaran operasional kegiatan APIP serta perencanaan kegiatan APIP,
- Budaya dan hubungan organisasi berupa pengelolaan organisasi APIP,
- struktur tata kelola berupa akses penuh terhadap informasi organisasi aset dan SDM.



4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. **Sasaran Meningkatnya Peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)**

Indikator Kinerja utama	2018		Capain
	Target	Realisasi	%
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100

Hasil capaian kinerja dari Sasaran **Meningkatnya Peran APIP Sebagai Konseling dan Penjamin Mutu (Quality Assurance)** dengan Indikator Kinerja Tingkat **Kapabilitas APIP**, realisasi target menunjukkan level 3. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2018 adalah tercapainya level 3 yaitu penilaian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Kapabilitas APIP terkait enam proses yang selanjutnya disebut elemen yaitu:

- peran layanan APIP berupa Audit Ketaatan,
- Pengelolaan SDM berupa Pengembangan profesi individu serta identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten,
- praktek profesional berupa perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan serta kerangka kerja praktek professional dan prosesnya.
- Akuntabilitas dan manajemen kinerja berupa anggaran operasional kegiatan APIP serta perencanaan kegiatan APIP,
- Budaya dan hubungan organisasi berupa pengelolaan organisasi APIP,
- struktur tata kelola berupa akses penuh terhadap informasi organisasi aset dan SDM.



Simpulan : realisasi yang tercapai sesuai dengan yang ditargetkan untuk mengukur sasaran strategis.

Langkah kedepan : Dengan terpenuhinya level 3 atas kapabilitas APIP merupakan tantangan kedepan untuk meningkatkan level yang lebih tinggi dengan peran dan layanan APIP sebagai layanan konsultasi dan melaksanakan audit kinerja/program evaluasi yang telah dimulai dengan adanya Klinik APBD di Inspektorat Kota Balikpapan.

b. Sasaran Strategis meningkatnya penyelesaian tindak lanjut pengawasan

Indikator Kinerja utama	2018		Capain
	Target	Realisasi	%
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan	82%	91.65%	111.77%

Hasil capaian kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan, dengan indikator sebagai berikut :

- a) Indikator kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, adapun target yang ditetapkan diawal tahun 2018 sebesar 82%, realisasi target menunjukkan angka 91.65% yang diperoleh dari hasil pemeriksaan/ pengawasan APIP Inspektorat Kota Balikpapan berdasarkan PKPT dan Non PKPT dengan jumlah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti auditi sebanyak 200 rekomendasi atau 85,10% dari 235 rekomendasi, Dimana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Balikpapan merupakan temuan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dan realisasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebanyak 754 rekomendasi atau 97,92% dari 770 rekomendasi, dimana tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang merupakan temuan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2018, 12



rekomendasi masih dalam proses dan 4 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Penyelesaian tindak lanjut ini adalah yang tertinggi dari 10 kabupaten/kota se-provinsi Kalimantan Timur. sehingga jika di rata-rata antara jumlah temuan yang ditindak lanjuti dari pemeriksaan APIP dengan temuan yang telah ditindak lanjuti dari pemeriksaan BPK diperoleh persentase sebesar 91,65%.

Simpulan :

- TL atas temuan BPK-RI (2004 – 2018) : 97,92% (754 Tindak Lanjut dari 770 rekomendasi)
- TL atas Temuan APIP : 85,39 % (200 Tindak Lanjut dari 235 Rekomendasi)
- Penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI ini adalah yang tertinggi dari 10 kabupaten/kota se-provinsi Kalimantan Timur.

Hambatan : kurangnya tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan APIP Inspektorat Kota Balikpapan adalah lemahnya kesadaran OPD/Auditi untuk melaksanakan tindak lanjut.

Langkah kedepan (Tindak Lanjut Temuan BPK) : mempertahankan kondisi berupa percepatan dan pendampingan tindak lanjut atas temuan BPK-RI.

Langka-langkah yang diambil (Tindak Lanjut Temuan APIP) : bahwa di periode mendatang lebih mengoptimalkan rapat koordinasi pengawasan daerah tingkat kota dan percepatan tindak lanjut pada masa pemeriksaan/pengawasan.



c. Sasaran strategis meningkatnya efektifitas implementasi pelaksanaan SPIP

Indikator Kinerja utama	2018		Capain
	Target	Realisasi	%
Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang	3	10	333

Hasil capaian kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas Implementasi Pelaksanaan SPIP, dengan indikator sebagai berikut :

- Indikator kinerja jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang, capaian target menunjukkan angka 10. Adapun target yang ditetapkan diawal tahun 2018 berjumlah 3 , sedangkan realisasi yang dapat dicapai sebesar 10 OPD dari 3 OPD yang ditargetkan tahun 2018. Yang dimaksud dengan jumlah perangkat daerah yang telah mengimplementasikan SPIP level berkembang adalah Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun RTP (Rencana Tindak Pengendalian) sebagaimana diamanatkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor:188.45-535/2014 tanggal 14 agustus 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Atas dasar hal tersebut maka diwajibkan kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan untuk melakukan penilaian risiko pada setiap proses bisnis dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian yang ditetapkan secara formal oleh setiap pejabat OPD. Adapun OPD yang telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) berjumlah 10 OPD yang terdiri dari :



1. Inspektorat;
2. Dinas Pekerjaan Umum;
3. Sekretariat Daerah,
4. Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
5. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata,
7. Dinas Perdagangan;
8. Kesbang Pol;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
10. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

Sebagai informasi tambahan, terdapat Laporan Hasil Penilaian Kembali Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Laporan hasil Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada Level **terdefinisi** atau tingkat 4 dari 6 tingkat maturitas SPIP.

Simpulan : realisasi yang tercapai telah melampaui target yang ditetapkan.

d. Sasaran strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja utama	2018		Capain
	Target	Realisasi	%
Jumlah penetapan perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	3	3	100

Hasil capaian kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi , dengan indikator sebagai berikut :

- Indikator kinerja Jumlah penetapan perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM capaian target yang ditetapkan diawal tahun 2018



berjumlah 3 OPD sedangkan realisasi yang dicapai Tahun 2018 berjumlah 3 OPD. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-72/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 Tentang penetapan OPD dan unit kerja sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yaitu :

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu;
3. Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Tipe B Daerah Kota Balikpapan.

Sedangkan tahun sebelumnya 2017 telah ditetapkan 4 OPD Berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-498/2016. tentang penetapan perangkat daerah tahap II sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yaitu :

1. Dinas Perhubungan
2. Dinas Ketenagakerjaan
3. Dinas Perpustakaan dan Arsip
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan..

Simpulan : realisasi sama dengan target yang ditetapkan awal tahun 2018.

Langkah kedepan : mempertahankan dan meningkatkan jumlah OPD yang ditetapkan menuju WBK/WBBM dengan dilakukan pendampingan oleh tim Inspektorat Kota Balikpapan



e. Sasaran Meningkatnya Penilaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja utama	2018		Capain 2018
	Target	Realisasi	%
Jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik"	8 OPD	24 OPD	300%

Hasil capaian kinerja dari **Sasaran Meningkatnya Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah** dengan indikator sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik", adapun target yang ditetapkan awal tahun 2018 adalah 8 OPD sedangkan realisasi yang diperoleh berjumlah 24 OPD nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik". Adapun OPD tersebut terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan nilai 87,74 kategori A.
 2. Dinas Kesehatan dengan nilai 84,60 kategori A.
 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan nilai 75,92 kategori BB;
 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nilai 75,56 kategori BB;
 5. RS Bersalin Sayang Ibu dengan nilai 73,41 kategori BB;
 6. Inspektorat dengan nilai 72,61 kategori BB;
 7. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan nilai 71,79 kategori B;
 8. Dinas Perhubungan dengan nilai 70,50 kategori BB;
 9. Kantor Arsip dan Perpustakaan dengan nilai 69,53 kategori B;
 10. Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan dengan nilai 69,24 kategori B;



11. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan nilai 68,16 kategori B;
12. *Sekretariat Daerah* dengan nilai 68,05 kategori B;
13. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dengan nilai 66,55 kategori B;
14. Kecamatan Balikpapan Timur dengan nilai 67,65 kategori B;
15. Dinas Pekerjaan Umum dengan nilai 65,93 kategori B;
16. Dinas Ketenagakerjaan dengan nilai 65,85 kategori B;
17. Satuan Polisi Pamong Praja dengan nilai 65,83 kategori B;
18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 74,26 kategori BB;
19. Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai 65,20 kategori B;
20. Dinas Koperasi,UMKM dan Perindustrian dengan nilai 64,62 kategori B;
21. *Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang* dengan nilai 63,08 kategori B;
22. *Badan Pengelola dan Keuangan Daerah* dengan nilai 62,98 kategori B;
23. Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai 62,63 kategori B;
24. Dinas Tata Kota dan Perumahan dengan nilai 60,20 kategori B;

Realisasi tersebut diperoleh dari Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2018 yang telah dilaksanakan. Evaluasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jika Dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan jumlah OPD yang nilai evaluasi SAKIP nya bernilai minimal "Baik" dikarenakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2018, OPD dengan nilai minimal "Baik" berjumlah 24 OPD.

Simpulan : Capaian indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan.

b. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Keuangan sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kota Balikpapan, dianggarkan melalui APBD Kota Balikpapan. Total Anggaran Inspektorat Kota Balikpapan adalah sebesar Rp.12.591.749.100,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.11.618.215.831,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai (92,27%), maka dengan demikian terdapat SILPA sebesar Rp. 973.533.690,00 hal ini merupakan penghematan penggunaan anggaran.

Anggaran Belanja Inspektorat Kota Balikpapan adalah sebesar Rp. 12.591.749.100,00 terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 9.268.010.000 dengan realisasi sebesar Rp 8.711.381.861 (93,99%)
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.323.739.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.906.833.970,00 (87,46%) yang terbagi atas :
 - 1) Anggaran pelaksanaan 2 (dua) program yang bersifat umum dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp 1.764.092.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.575.981.786,00 atau (89,34%)



- 2) Anggaran pelaksanaan 2 (dua) program yang bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sebesar Rp 1.577.647.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.330.852.184,00 atau (84,46%).



Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2018 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatnya peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)	Tingkat Kapabilitas APIP	1. Peningkatan Kapabilitas APIP 2. Pengusulan Dupak CPFA dan PFA dan Jabatan Fungsional P2UPD di Lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan	Level 3	Level 3	100%	682.644.000,00	619.851.398	90,80%
				<i>Prosentase capaian kinerja</i>		100%	<i>Prosentase rata-rata capaian realisasi keuangan</i>		90,80%
2.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut pengawasan	Presentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan/ pengawasan	Pemantauan, Penyusunan dan Pemutakhiran Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Pengembangan Sistem Pemantauan TLHP	82%	91,65%	111,77%	69.342.000,00	60.829.050,00	87,72%
			Pelaksanaan pemeriksaan khusus/investigatif/riktu/pengaduan masyarakat dilingkup pemerintah kota balikpapan				77.600.000,00	46.094.777,00	59,40%



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

				<i>Prosentase capaian kinerja</i>		111,77 %	<i>Prosentase rata-rata capaian realisasi keuangan</i>		73,56%
3	Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang	Pelaksanaan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2	10	500 %	21.500.000,00	20.100.000,00	93,49%
				<i>Prosentase capaian kinerja</i>		500%	<i>Prosentase rata-rata capaian realisasi keuangan</i>		93,49%
4	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah penetapan perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zone Integritas pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	3	3	100 %	8.110.000,00	5.222.758,00	97,06%
			Pencegahan/pemberantasan korupsi (pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kota Balikpapan dan evaluasi aksi pencegahan korupsi)				454.550.000,00	390.485.545,00	85,90%
			Pelaksanaan saber pungli di lingkungan pemerintah kota Balikpapan				75.790.000,00	16.754.983,00	22,10%



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

			Monitoring dan pemantauan LHKASN Di lingkungan pemerintah kota balikpapan				17.300.000,00	14.212.230,00	82,15%
				<i>Prosentase capaian kinerja</i>		100%	<i>Prosentase rata-rata capaian realisasi keuangan</i>		71,80%
5.	Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal Baik	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/pemeriksaan dengan tujuan tertentu, reuiu RKA OPD PPKD, Reuiu RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan	8	24	300 %	35.000.000,00	21.839.693,00	62,39%
				<i>Prosentase capaian kinerja</i>		300 %	<i>Prosentase rata-rata capaian realisasi keuangan</i>		62,39%



Berdasarkan tabel diatas maka untuk mengukur efektifitas penggunaan dana maka yang diukur adalah realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran yang dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

NO	SASARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	Meningkatnya peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)	100%	90,80%
2	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut pengawasan	111,77%	73,56%
3	Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan SPIP	500%	93,46%
4	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi	100%	71,80%
5	Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	300%	62,39%
	RATA-RATA	222,35	78,40%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi dan efektifitas yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan kinerja yang dicapai pada tahun 2018 maka realisasi anggaran sebesar 78,40% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 222,35 % menunjukkan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana. Adapun tingkat efisiensi terhadap aspek sumber daya manusia auditor / P2UPD sebanyak 28 orang melakukan pemeriksaan obrik/auditi yang berjumlah 95 obyek pengawasan dalam setahun dan obyek pemeriksaan kasus berjumlah 10 kasus.



BAB IV PENUTUP

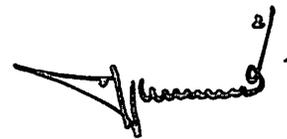
Laporan Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2018, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *Stakeholder* sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Balikpapan, Februari 2019

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN



Hj. DAHNIAR, S.E., M.AP.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan dalam rangka mewujudkan Tema Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. DAHNIAR, SE, M.AP**
Jabatan : **INSPEKTUR**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI, S.E**
Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2018 yang merupakan tahapan pencapaian target kinerja yang tertuang didalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja khusus yang merupakan pendukung pencapaian Tema Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 yaitu Tahun Integritas.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sesuai dokumen perencanaan dan target kinerja khusus menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pencapaian target kinerja dan target kinerja khusus yang diperjanjikan sesuai lampiran ini merupakan indikator penilaian dan bahan evaluasi kinerja pihak pertama oleh pihak kedua.

Pihak kedua dapat melakukan evaluasi dalam rangka penempatan dalam jabatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh pihak kedua.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. M. RIZAL EFFENDI, S.E

Balikpapan, 15 Januari 2018

Pihak Pertama

Hj. DAHNIAR, SE, M.AP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2018
INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kemampuan APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)	Meningkatnya peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan/pengawasan	82%
	2. Meningkatkan efektivitas implementasi pelaksanaan SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang	2
	3. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Penetapan Perangkat Daerah yang berpredikat WBK/WBEM	3
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik"	8

PROGRAM

ANGGARAN

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | Rp 950.283.000,00- |
| 2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Rp 432.314.000,00- |

WALI KOTA BALIKPAPAN,

HM. RIZAL EFFENDI, S.E.

Balikpapan, Januari 2018

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN

Hi. DAHNIAR, S.E., M.AP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SATUAN	TARGET	SUMBER DATA
Optimalnya peran APIP sebagai konseling dan mutu (Quality assurance)	Tingkat Kapabilitas APIP	1. Audit ketaatan 2. Identifikasi dan rekrutman SDM yang kompeten 3. perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan 4. Perencanaan kegiatan APIP 5. Anggaran operasional kegiatan APIP 6. Pengelolaan organisasi APIP 7. Hubungan pelaporan telah terbangun 8. Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	Level	3	BPKP-RI
Optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan/pengawasan	$\frac{\sum \text{Jumlah Temuan yang telah ditindak lanjutin}}{\sum \text{Jumlah temuan}} \times 100\%$	Persentase	82%	BPK-RI dan Inspektorat Kota Balikpapan
Optimalnya efektivitas implementasi pelaksanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang	Jumlah OPD yang menyusun RTP	OPD	2	Inspektorat Kota Balikpapan
Optimalnya pelaksanaan reformasi	Jumlah Penetapan Perangkat Daerah yang berpredikat WBK/WBBM	Jumlah Penetapan Perangkat Daerah yang berpredikat WBK/WBBM	OPD	3	Usulan Kepala Daerah Ke MENPAN & RB
Optimalnya penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi SAKIP "Baik"	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik"	OPD	8	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektur Kota Balikpapan

PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN	KETERANGAN
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Rp. 950,283,000.00	APBD	
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan	Rp. 432,314,000.00	APBD	

WALIKOTA BALIKPAPAN

RIZAL EFFENDI, S.E

Balikpapan, Januari 2018
INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN

Hi. DAHNIAR, S.E.,M.AP

**PERJANJIAN KINERJA KHUSUS
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
TAHUN : 2018

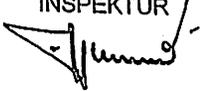
NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET SEMESTER I	TARGET SEMESTER II	KETERANGAN
1	Tertib Penggunaan dan Administrasi Daftar Hadir Elektronik	a. Penggunaan Daftar Hadir elektronik	99% hari kerja	99% hari kerja	
		b. Tertib Administrasi Pengendalian Daftar Hadir	Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali	Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali	
2	Pencegahan Korupsi	Persentase Penandatanganan Pakta Integritas	100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah melakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas)	100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator tidak melakukan Pelanggaran Pakta Integritas)	
3	Penguatan Akuntabilitas	Persentase penandatanganan Perjanjian Kinerja Individu yang terkait dengan Kinerja Perangkat Daerah	100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah melakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Individu)	100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah dilakukan Pengukuran Kinerja Individu secara periodik)	

Balikpapan, Januari 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN


H. M. RIZAL EFFENDI, SE

INSPEKTUR


Hj. DAHNIAR, S.E., M.AP

Menyaksikan,

WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN


H. RAHMAD MAS'UD, SE

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN


Drs. SAYID MN FADLI, M.SI

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2018

Kota : Balikpapan
SKPD : Inspektorat Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100
2	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan/pengawasan	82%	91,65%	111,77
3	Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang	2	10	500
4	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Penetapan Perangkat Daerah yang berpredikat WBK/WBBM	3	3	100
5	Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik"	8	24	300

Program

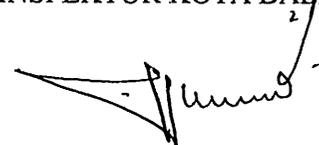
Anggaran

Realisasi

- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | Rp. 895.003.000,00 | Rp. 711.000.786,00 |
| 2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Rp. 682.644.000,00 | Rp. 619.851.398,00 |

Balikpapan, Januari 2019

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN



Hj. DAHNIAR, S.E., M.AP
NIP. 19631111 198511 2 003

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kasubag	Tim Penyusunan SAKIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk mengumpulkan data Kinerja					Struktur organisasi	15 menit	draft tim	
2	Membentuk tim					Draft tim	30 Menit	Tim	
3	Menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data					Tim	3 hari	Rencana kegiatan pengumpulan data	
4	Menghimpun data kinerja, menyusun konsep laporan					Data kinerja	1 hari	Konsep laporan hasil pengumpulan data	
7	Laporan Kasubag kepada Sekretaris terkait hasil pengumpulan data kinerja					Konsep laporan data kinerja	1 hari	Konsep laporan hasil pengumpulan data	
	Melakukan rapat intern dengan Tim					Data kinerja	30 Menit	Laporan final	
8	Hasil Pengumpulan data					Data kinerja yang telah diparaf	1 hari	Laporan yang telah di ttd	

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

**INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2018**

**KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2017 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Balikpapan yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Balikpapan, Januari 2018

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN



Hi. DAHNIAR, SE., MAP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	
INSPEKTORAT.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.....	8
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018	9
BAB III PENUTUP.....	11
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja dan merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis SKPD. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja pada prinsipnya merupakan variabel yang termuat dalam dokumen renstra, dengan demikian RKT hanya tinggal menjabarkan saja setiap tahunnya sasaran yang hendak dilaksanakan sampai dengan lima tahun kedepan.

Inspektorat Kota Balikpapan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan.

Inspektorat Kota Balikpapan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Balikpapan dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Balikpapan ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Balikpapan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Kota Balikpapan mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. perumusan kebijakan tata kelola Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penelitian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah;
- e. pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 Inspektorat Kota Balikpapan disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran

maupun pengawasan pada Inspektorat Kota Balikpapan.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Tahun 2017 adalah sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Kota Balikpapan beserta pagu anggarannya sesuai dengan sasaran strategik yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT OPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT OPD.

1.3 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2017.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT OPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2018.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA OPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi OPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2017**

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2016 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2016 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 pada Inspektorat Kota Balikpapan, sebagaimana pada tabel dibawah ini

Tabel. Capaian Kinerja Tahun 2017

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	100
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan	80%	86,04%	107,55
Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang	2	8	400
Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat WBK	2	4	200
Jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik"	6	22	367

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Inspektorat Kota Balikpapan, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Rencana Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan tahun 2018 memiliki 5 (lima) sasaran strategis yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatnya peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (*Quality Assurance*)
2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan.
3. Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan SPIP.
4. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
5. Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Dari kelima sasaran tersebut diatas, Rencana Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2018 berusaha untuk mewujudkan visi dan misi Renstra Inspektorat yaitu Terwujudnya Institusi Pengawasan Internal yang Bersih dan Profesional Menuju Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.

Adapun indikator dan target kinerja tahun 2018 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET
Meningkatnya peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)	Tingkat kapabilitas APIP	Level 3
Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan/pengawasan	82 %
Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang	2
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Penetapan Perangkat Daerah yang berpredikat WBK/WBBM	3
Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi SAKIP "Baik"	8

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Perangkat Daerah : INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN
Tahun : 2018

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya peran APIP sebagai konseling dan penjamin mutu (quality assurance)	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan	82 %
Meningkatnya efektifitas implementasi pelaksanaan SPIP	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SPIP level berkembang	2 OPD
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Penetapan Perangkat Daerah yang berpredikat WBK/WBBM	3 OPD
Meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang nilai evaluasi SAKIP minimal "Baik"	8 OPD

Balikpapan, Januari 2018

INSPEKTUR



Hj. DAHNIAR, S.E., M.AP

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2018 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2018 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Balikpapan disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

